

T E S I S

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh:

NAMA : RIZKY MAULIDIN

NOMOR POKOK : 1863002171

**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA**

KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.AP)**



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2020**

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Rizky Maulidin
Nomor Pokok Mahasiswa : 1863002171
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tugas Akhir/Tesis : Penatausahaan Barang Milik Negara
Pada Kantor Wilayah DKI Jakarta
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, 26 Oktober 2020
Pembimbing Tesis


(Dr. A. Rina Herawati, M.Si)

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RIZKY MAULIDIN
NOMOR POKOK : 1863002171
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
NEGARA
JUDUL TUGAS AKHIR/TESIS : Penatausahaan Barang Milik
Negara Pada Kantor Wilayah DKI
Jakarta Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Telah mempertahankan tesis dihadapan tim penguji tesis
Program Magister terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 31 Oktober 2020
Pukul : 13.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

TIM PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. R.N.Afsdy Saksono, M.Sc

Sekretaris : Dr. Asropi, M.Si

Anggota : Yogi Suwarno, MA., Ph.D

Pembimbing Tesis
/Anggota : Dr. A.Rina Herawati

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Maulidin
NPM : 1863002171
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 26 Oktober 2020



Penulis,
Rizky Maulidin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga Tesis dengan judul “Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr. AP) pada Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Nurliah Nurdin, MA Direktur Politeknik Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Dr. A. Rina Herawati, M. Si atas bimbingan ilmu, tenaga, pikiran serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan perkuliahan serta kesediaannya mengikut sertakan penulis pada Seminar Internasional (ICoGPASS 2019).
3. Dr. R.N.Afsdy Saksono, M.Sc , Dr. Asropi, M.Si dan Yogi Suwarno, MA., Ph.D, yg telah memberikan masukan dan saran saat Seminar Proposal, Seminar Hasil Tesis dan Ujian Tesis.
4. Dosen-Dosen Program Magister Administrasi Pembangunan Negara khususnya Dosen Manajemen Keuangan Negara yang telah memberikan ilmu dan

bimbingan dalam mendalami Ilmu Administrasi, serta semua civitas akademis Politeknik STIA LAN Jakarta atas dukungan dan bantuannya.

5. Bapak dan Ibu Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) beserta staf STIA-LAN Jakarta.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Terapan Manajemen Keuangan Negara Angkatan Tahun 2018 yang selalu kompak sampai akhir semester, walaupun semester akhirnya berbeda.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, rekan kerja pada subbagian keuangan dan BMN kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta atas dukungan dan bantuannya.
8. Orang tua saya Bapak Rosyid dan Ibu Dian Indriyanah, Mertua saya Bapak Hanapi dan Ibu Sunarti serta kakak dan semuanya yang telah memberikan dukungan & doanya.
9. Istri saya Zaviera Hanafirda, S,Pd, atas segala motivasi, perhatian, doa serta kesabaran dalam mendukung terselesaikannya pendidikan magister ini.
10. Kepada semua pihak yg telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yg ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan pengembangan lanjut agar lebih bermanfaat. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap Tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi.

Jakarta, 26 Oktober 2020

Rizky Maulidin



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRAK

**RIZKY MAULIDIN, 1863002171
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

123 halaman, 5 bab, 17 gambar, 5 lampiran
Daftar Pustaka : 12 buku, 7 peraturan, 10 jurnal

Abstrak — Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses penatausahaan barang milik negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta sebagai unit kerja yang menguasai barang milik Negara (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang). Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. dan proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan review dokumen. Hasil penelitian menunjukkan 1) belum dilakukan Pembukuan BMN dengan dicatatkan dalam aplikasi SIMAK BMN dikarenakan proses pengiriman dilakukan secara bertahap serta Registrasi aset dilaksanakan setelah adanya notisi audit; 2) Inventarisasi BMN pada DBR (Daftar Barang Ruangan) dan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) yang belum diperbaharui oleh kuasa pengguna barang atas perpindahan barang antar lokasi/ruangan sehingga belum optimalnya pengawasan dan pengendalian; 3) Pelaporan BMN dalam kondisi rusak berat diinput dalam kategori aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, hal ini dijadikan acuan untuk melakukan pengajuan usulan penghapusan BMN dan dalam laporan BMN tahunan terdapat pengungkapan jumlah nilai aset yang sudah memiliki surat keputusan PSP (Penetapan Status Pengguna) dan yang belum memperoleh PSP. Dengan demikian, Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Hukum dan hak asasi manusia Kanwil DKI Jakarta sangat kompatibel guna melindungi aset Negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Kata kunci— Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Barang Milik Negara

**APPLIED MASTER PROGRAM
STATE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
STATE ADMINISTRATION AGENCY**

ABSTRACT

**RIZKY MAULIDIN, 1863002171
ADMINISTRATION OF STATE PROPERTY AT THE
REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW AND
HAM, DKI JAKARTA**

123 page, 5 chapter, 17 picture, 5 attachment
Bibliography: 12 books, 7 rules, 10 journals

Abstract- This study aims to describe the process of administration of state property in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of DKI Jakarta as a work unit that controls state property (Accounting Unit for Power Users of Goods). This research method uses a case study method with a descriptive qualitative approach. and the data collection process using observation, interview, and document review techniques. The results showed 1) BMN Bookkeeping had not been carried out by being recorded in the SIMAK BMN application because the delivery process was carried out in stages and asset registration was carried out after an audit notation was made; 2) Inventory of BMN on DBR (List of Room Items) and DIR (List of Room Inventory) which have not been updated by the power of goods users for the movement of goods between locations / rooms so that supervision and control are not optimal; 3) Reporting of BMN in severely damaged condition is inputted in the category of fixed assets that are not used in government operations, this is used as a reference for submitting proposals for BMN elimination and in the annual BMN report there is a disclosure of the total value of assets that already have a PSP decree (Determination of User Status) and who have not received a PSP. Thus, the Administration of State Property at the Ministry of Law and Human Rights of the DKI Jakarta Regional Office is very compatible in order to protect state assets for the realization of good governance.

Keywords— Bookkeeping, Inventory, Reporting, State Property

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
Daftar Singkatan	xvii
BAB I Permasalahan Penelitian	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Akademis	7

2. Manfaat Terhadap Dunia Praktis	7
---	---

BAB II Kerangka Teori

A. Tinjauan Teori dan Kebijakan	8
1. Barang Milik Negara	11
2. Pengelolaan Barang Milik Negara	14
3. Penatausahaan Barang Milik Negara	18
a) Pembukuan	23
b) Inventarisasi	29
c) Pelaporan	31
B. Penelitian terdahulu	37
C. Konsep Kunci	40
D. Model Berpikir	42
E. Pertanyaan Penelitian	43

BAB III Metodologi Penelitian

A. Metode Penelitian	44
B. Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	45
1. Observasi	46
2. Wawancara	46

3. Reviu Dokumen	48
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
1. Teknik Pengolahan Data	49
2. Teknik Analisis Data	50
a) Reduksi Data	50
b) Menyajikan data	51
c) Menarik Kesimpulan	51
 BAB IV Hasil Penelitian	
A. Deskripsi Objek Penelitian	52
1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	52
a) Tugas dan Fungsi Organisasi	54
b) Struktur Organisasi	55
c) Struktur Penatausahaan BMN	56
B. Penyajian data dan Pembahasan	57
1. Penyajian Data	57
a) Pembukuan BMN.....	61
b) Inventarisasi BMN	68
c) Pelaporan BMN	73
2. Pembahasan	80
a) Analisis Pembukuan BMN	80

b) Analisis Inventarisasi BMN	87
c) Analisis Pelaporan BMN	96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Bagan Penatausahaan BMN	23
Gambar 2.2 : Model Berpikir	42
Gambar 4.1 : Gedung Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jakarta	52
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Kanwil Kemenkumham Jakarta	56
Gambar 4.3 : BMN Transfer ke Divisi Imigrasi	58
Gambar 4.4 : BMN Hasil dari proses pembelian barang 2018	59
Gambar 4.5 : BMN yang diajukan penghapusan oleh kanwil DKI	59
Gambar 4.6 : BMN yang belum mendapatkan PSP	60
Gambar 4.7 : Transfer Keluar BMN Divisi Imigrasi	82
Gambar 4.8 : Daftar Barang Ruangan KaKanwil DKI Jakarta	83
Gambar 4.9 : Daftar BMN yang belum PSP dalam Aplikasi	85
Gambar 4.10 : Berita Acara Serah Terima BMN	89
Gambar 4.11 : Lampiran BMN yang disetujui untuk dihapuskan	92
Gambar 4.12 : Hasil Inventaris BMN yang diajukan PSP	93
Gambar 4.13 : Laporan Transfer Keluar dalam Simak BMN	97
Gambar 4.14 : SK Penghapusan BMN pada Kanwil Kumham	100
Gambar 4.15 : Pengantar pengajuan PSP BMN	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Key Informan Penelitian	47
Tabel 4.1 : Analisis Kualitas Pada Aspek Pembukuan	87
Tabel 4.2 : Analisis Kualitas Pada Aspek Inventarisasi	95
Tabel 4.3 : Analisis Kualitas Pada Aspek Pelaporan	104

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Matriks Pendelitian	113
Lampiran 2 : Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	114
Lampiran 3 : Pedoman Observasi	120
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	121
Lampiran 5 : Pedoman Reviu Dokumen	124

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

ADK	: Arsip Data Komputer
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BMN	: Barang Milik Negara
DBR	: Daftar Barang Ruangan
DBL	: Daftar Barang Lainnya
DBKP	: Daftar Barang Kuasa Pengguna
DIR	: Daftar Inventaris Ruangan
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
KIB	: Kartu Identitas Barang
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
LBP	: Laporan Barang Pengguna
LBKPS	: Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PSP	: Penetapan Status Penggunaan
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
SIMA	: Sistem Informasi Manajemen Aset
SIMAK	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
UPKPB	: Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang
UPPB-W	: Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah
UPPB-E1	: Unit Penatausahaan Pengguna Barang Esselon I
UPPB	: Unit Penatausahaan Pengguna Barang

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat menjadikan kebutuhan dan keinginan manusia semakin banyak dan kompleks sehingga tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu dibentuklah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama yang disebut organisasi. Negara merupakan organisasi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang mempunyai tujuan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (RI) tahun 1945, yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Untuk merealisasikan tujuan Negara Republik Indonesia, maka dibentuklah suatu tata pemerintahan, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan diperlukan reformasi dalam setiap sektor yang menopang berjalannya sebuah pemerintahan. Dapat dipahami bahwa reformasi nasional telah mengubah sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mendukung kondisi tersebut pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Dalam penerapannya, *Good Governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent of change/Agent of Development* (pendorong proses perubahan dan pembangunan) dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam negara berkembang. (Iwan,2018)

Program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun reformasi tata kelola keuangan negara, melalui penerapan reformasi ini dilakukanlah berbagai perbaikan, salah satunya di bidang keuangan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lingkup perubahan yang sangat mendasar dan bersifat menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset negara. *International best practice* memperlihatkan peran strategis pengelolaan aset negara sebagai salah satu indikator penting pengelolaan anggaran negara dan upaya perwujudan akuntabilitas tata kelola suatu keuangan negara. (Hadinata, 2011:1)

Selanjutnya, dengan diterbitkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU ini menjadi titik perubahan paradigma aset negara, dari semula sebagai administrasi aset menjadi manajemen aset. Manajemen aset merupakan panduan untuk pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. (Sugiama, 2013:15)

Sebagai pedoman pengelolaan aset negara telah diterbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang menjelaskan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN yang dimiliki oleh setiap Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Pengelolaan BMN merupakan keharusan bagi setiap Kementerian/Lembaga yang wajib dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon II (dua) yang membidangi urusan perlengkapan.

Data rinci dan nilai akuntansi dari Barang Milik Negara selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan jumlah BMN dari tahun ke tahun makin meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam menciptakan pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel maka seluruh BMN harus dicatat, diinventarisasi dan dilaporkan secara berkala. Pengelolaan BMN memiliki beberapa aturan teknis, yang salah satunya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Penatausahaan harus selalu dilakukan agar data barang yang disajikan menjadi benar, akurat, lengkap dan mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. oleh semua instansi pemerintah, tak terkecuali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (RI). Penatausahaan BMN dilaksanakan oleh unit yang melakukan penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Penatausahaan BMN dilakukan oleh setiap tingkatan unit kerja yang menguasai BMN sesuai dengan struktur organisasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Salah satu satuan kerja yang berkedudukan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI merupakan instansi vertikal langsung dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Karena masih merupakan instansi vertikal maka barang atau aset yang dikelola instansi ini adalah barang/aset milik negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan BMN yang didanai oleh APBN, Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI wajib melakukan pertanggungjawaban BMN secara tepat, akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam membuat laporan BMN harus memenuhi prinsip tepat waktu dan jumlah, maka Menteri Keuangan membuat suatu sistem yang mempermudah dalam pengelolaan BMN yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau disingkat sebagai SIMAK BMN.

SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sehingga dapat dilakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang. SIMAK BMN memiliki konsep manajemen barang yang pelaporannya memiliki tujuan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

APBN dalam bentuk neraca. Penerapan SIMAK BMN pada Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dilaksanakan sebagai salah satu tugas dan fungsi dari sub bagian keuangan dan BMN.

Dalam pelaksanaan penatausahaan barang/aset negara di Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI masih ditemukan sejumlah permasalahan. Sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI mengenai audit pengelolaan dalam lingkup penatausahaan barang milik negara tahun anggaran 2018 – 2019 pada Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, antara lain:

1. BMN transfer masuk antar divisi belum dilakukan pembukuan pada aplikasi SIMAK BMN.
2. BMN hasil dari proses pembelian barang tahun 2018 belum dilengkapi dengan Nomor Registrasi Aset.
3. Aset dalam keadaan sudah dihentikan penggunaannya tetapi belum dilakukan upaya penghapusan.
4. Terdapat aset tetap belum memperoleh Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Penatausahaan BMN menjadi salah satu fokus kerja Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI karena di setiap tahunnya akan menjadi temuan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI yang sangat material dan mempengaruhi neraca pemerintahan pusat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Penatausahaan BMN pada Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI belum menunjukkan terlaksananya tertib administrasi yang meliputi aspek pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN pada kuasa pengguna barang/aset negara sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian penulis tertarik mengambil judul penelitian “PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka fokus permasalahan yang akan dikaji adalah "Bagaimanakah penatausahaan barang milik negara pada Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penatausahaan barang milik negara pada Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

D. Manfaat penelitian

a. Manfaat Akademis

Dengan mengetahui bagaimana penatausahaan barang milik negara pada Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan dapat memperkaya pemahaman teori dalam bidang manajemen aset.

b. Manfaat terhadap dunia praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta agar pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara menjadi lebih tertib dan efektif, sehingga dapat meminimalisir temuan auditor internal maupun eksternal dan dapat segera mendeteksi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan saat ini sehingga dapat dilakukan perbaikan dimasa yang akan datang .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DKI Jakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Pembukuan BMN

Penatausahaan BMN Kanwil DKI Jakarta dalam aspek pembukuan belum baik dan tertib. Hal ini dikarenakan Barang Transfer Masuk antar divisi belum dicatatkan dalam pembukuan BMN pada aplikasi SIMAK BMN dan belum semua BMN pembelian tahun 2018 memiliki Nomor registrasi aset, serta tidak mengajukan PSP dalam batas waktu maksimal 6 bulan setelah barang diperoleh.

2. Aspek Inventarisasi BMN

Penatausahaan BMN Kanwil DKI Jakarta dalam aspek inventarisasi belum baik dan tertib. Hal ini dikarenakan dalam Barang Transfer Masuk antar divisi terdapat 2 (dua) buah “HUB” yang tidak ditemukan/hilang serta belum diperbaharui semua BMN dan perubahannya dalam DBR dan DIR atas perpindahan barang antar lokasi/ruangan.

3. Aspek Pelaporan BMN

Penatausahaan BMN Kanwil DKI Jakarta dalam aspek pelaporan belum baik dan tertib. Hal ini dikarenakan belum dilakukan penerimaan Arsip Data Komputer (ADK) Barang Transfer Masuk ke dalam aplikasi SIMAK BMN sehingga barang tersebut belum ada dalam penggunaan Daftar Barang Kuasa Pengguna; BMN hasil dari pembelian tahun 2018 belum masuk dalam daftar barang kuasa pengguna dan DIR yang belum ter-update sehingga tidak masuk dalam penambahan nilai dari aset kuasa pengguna; BMN dengan keadaan rusak berat dan dalam kategori aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan akan terus menurun nilai nya apabila belum keluar surat keputusan penghapusan dari Kementerian Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan aspek pembukuan, untuk setiap Barang Transfer Masuk/Keluar antar divisi dibuatkan Standar Operasional (SOP) dan ditetapkan jangka waktu batas akhir penyampaiannya.
2. Berkaitan dengan aspek inventarisasi, dibuat tim inventaris khusus yang bertanggung jawab terhadap BMN untuk memperbaharui semua barang dan perubahannya dalam DBR dan DIR atas perpindahan barang antar

lokasi/ruangan setiap bulan dan menunjuk penanggung jawab aset di setiap ruangan agar optimalnya pengawasan dan pengendalian BMN.

3. Berkaitan dengan aspek pelaporan BMN, dibuatkan SOP untuk rekonsiliasi pelaporan untuk dilaksanakan setiap bulan, tidak hanya semesteran dan tahunan agar neraca aset tetap pada SIMAK BMN menggambarkan keadaan yang sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, John Ardi, 2010, *Penatausahaan Barang Milik Negara: Suatu Pendekatan Sistem*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Andi Muhammad Bataral, Rakhmat2, Muhammad Nur Sadik2, Badu Ahmad. 2015. *Management Of Assets In New Public Management Perspective (Case Study: Optimization Of Lands And Buildings Asset At Local Government Of Makassar City)*. *Journal of Research in Humanities and Social Science*. Volume 3 . p. 39
PT. Rineka Cipta.
- Fauziah, Ifat. (2018), *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Penerbit Ilmu
- Gita Arasy Harwida, mohamad Djasuli, Sujatmiko Wibowo (2018). *Menyingkap Lakon Auditor Internal Pemerintah dalam melakukan Deteksi dan Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi*. *Journal of Applied Accounting and Taxatio*. Vol. 3, No. 2
- Hadinata, Acep. (2011), *Manajemen Aset*, Jakarta : STAN Press
- Hartono, Rudi, dkk. (2012), *Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara*, Jakarta : Kumham Press
- Hanis, MH, Trigunarsyah, B, &Susilawati, C. (2011). The application of public asset management in Indonesian local government: a case study in South Sulawesi Province. *Journal of Corporate Real Estate*, 13(1), pp. 15
- Iwan Awaludina, Harry Suharmanb, Fury Khristianty Fitriyah. 2018. The Influence of Intellectual Capital and Implementation of the Principles of Good Governance

- by State Property Managers on the Implementation of Fixed Asset Management.
Journal of Applied Accounting and Taxation. Vol. 3, No. 2. P.178
- Lelya Fetri Apriliana, Palikhatun, Payamta. 2019. *Asset Management Based On Management Information System and Accounting of State Property in The Public Service Agency*. International Journal of Economics, Business and Accounting Research. Vol.3 p.5
- Martikawati Gubali, Jantje Tinangon, & Rudy Pusung. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi Simak-Bmn Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3). 216
- Margono. (2012), *Penatausahaan Barang Milik Negara*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Nurul Atikoh, Eri Febrian dan Riko Hendrawan 2017. “ Fixed Asset Management In The Indonesian Government Agencies : A Case Study At Ministry of Trade”.
Journal of Economics, Commerce and Management V (12). 676
- Oktavia. (2016), *Penatausahaan Barang Milik Negara*, Jakarta : Pusdiklat KNPK
- Safuadi. (2014) *Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan
- Saragih, Risma. 2017. Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.7 (1). Hal 77-93

- Setiadi, Ivan. 2018. Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala. *e Jurnal Katalogis*. Vol. 6 (4) hal. 10-20
- Simatupang. Dian Puji N (2011). Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jakarta: badan Penerbit FHUI
- Siregar, Doli. (2016), *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*, Jakarta : Sinergi Manajemen Aset
- Sofyan. (2013), *Pengelolaan Barang Milik Negara*, Jakarta : Kumham Press
- Sugiama, A Gima. (2016), *Manajemen Aset Pariwisata*, Bandung : Guardaya Intimarta
- Suminto. (2004) Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief
- Theophil assey dan Bukaza Chachage. 2016. Improving accountability for public fixed assets using enhanced management system: Technical and procedural requirements, a case study of Tanzania. *American Journal of Research Communication*. Vol 4(11). p. 105
- Waloejo, Herry. 2011, *Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara*, Jakarta : Mitra Wacana Media

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan

Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemusnahan dan Penghapusan BMN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan BMN

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A